

PENGARUH KEPATUHAN MASYARAKAT TERHADAP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN UJI EMISI DALAM MENGATASI PENCEMARAN UDARA DI KOTA JAKARTA TIMUR

Marcella Al Masih¹, Hasuri Waseh², Sierfi Rahayu³
Administrasi Publik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang
E-mail: [*mrcllaalmsh@gmail.com](mailto:mrcllaalmsh@gmail.com)

ABSTRAK

Penurunan kualitas udara di Kota Jakarta Timur sebagian besar dipengaruhi oleh pesatnya pertumbuhan kendaraan bermotor serta rendahnya tingkat kepatuhan terhadap masyarakat kewajiban uji emisi kendaraan bermotor sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 66 Tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kehadiran terhadap masyarakat implementasi kebijakan uji emisi kendaraan bermotor dalam mengatasi polusi udara di Kota Jakarta Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik purposive sampling yang melibatkan 204 responden pemilik kendaraan bermotor di Jakarta Timur. Analisis penelitian didasarkan pada teori implementasi kebijakan Merilee S. Grindle yang menitikberatkan pada dimensi isi kebijakan dan lingkungan implementasi, sementara kepatuhan masyarakat diukur melalui indikator mempercayai, menerima, dan melakukan yang dikemukakan oleh Thomas Blass. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemenuhan masyarakat berada pada kategori baik (76%), sedangkan implementasi kebijakan uji emisi juga berada pada kategori baik (73,5%). Hasil pengujian statistik membuktikan bahwa kesejahteraan masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan kebijakan uji emisi kendaraan bermotor. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan kepatuhan masyarakat merupakan faktor penting dalam meningkatkan efektivitas kebijakan uji emisi, yang perlu didukung oleh ketersediaan fasilitas uji emisi yang memadai, sosialisasi yang lebih luas, serta penegakan hukum yang konsisten.

Kata kunci

Kepatuhan Publik, Implementasi Kebijakan, Pengujian Emisi, Polusi Udara.

ABSTRACT

The decline in air quality in East Jakarta is largely driven by rapid motor vehicle growth and low public compliance with mandatory vehicle emission testing as regulated under DKI Jakarta Governor Regulation Number 66 of 2020. This study aims to examine the effect of public compliance on the implementation of vehicle emission testing policy in addressing air pollution in East Jakarta. This research employs a quantitative approach using purposive sampling, involving 204 respondents who are motor vehicle owners in East Jakarta. The analysis is based on Merilee S. Grindle's policy implementation theory, focusing on policy content and implementation context, while public compliance is measured through the indicators of belief, acceptance, and action proposed by Thomas Blass. Data were analyzed using SPSS version 29 with simple linear regression analysis. The findings indicate that public compliance is categorized as good (76%), while policy implementation is also categorized as good (73.5%). Statistical results show that public compliance has a positive and significant effect on the implementation of the vehicle emission testing policy. The study concludes that improving public compliance is essential to enhance policy effectiveness, supported by adequate emission testing facilities, broader public outreach, and consistent law enforcement.

Keywords

Public Compliance, Policy Implementation, Emission Testing, Air Pollution.

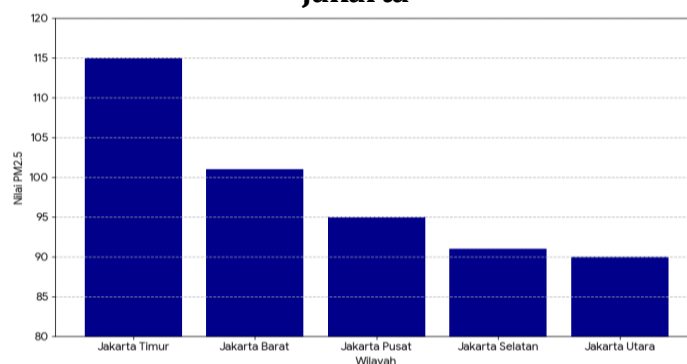
1. PENDAHULUAN

Pencemaran udara merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang semakin serius di wilayah perkotaan, termasuk di Provinsi DKI Jakarta. Kualitas udara yang buruk tidak hanya berdampak pada degradasi lingkungan, tetapi juga berpengaruh secara langsung terhadap kesehatan masyarakat, produktivitas ekonomi, serta kualitas hidup secara keseluruhan. Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) menyatakan bahwa paparan polusi udara, khususnya partikel halus PM2.5, memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan risiko penyakit pernapasan, penyakit kardiovaskular, hingga kematian dini. Dalam konteks global, isu kualitas udara juga menjadi bagian penting dari komitmen pembangunan berkelanjutan yang tertua dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), terutama pada tujuan yang berkaitan dengan kesehatan, kota berkelanjutan, dan penanganan perubahan iklim.

Di Indonesia, permasalahan pencemaran udara menjadi semakin kompleks di kota-kota besar dengan tingkat urbanisasi dan mobilitas yang tinggi, salah satunya di Provinsi DKI Jakarta. Aktivitas transportasi darat telah lama diidentifikasi sebagai salah satu sumber utama polusi udara perkotaan, terutama melalui emisi gas buang kendaraan bermotor. Dominasi kendaraan pribadi, khususnya sepeda motor, menyebabkan peningkatan konsentrasi polutan udara seperti PM2.5 yang sulit dikendalikan hanya melalui pendekatan teknis semata.

Di antara lima wilayah administratif di DKI Jakarta, Kota Jakarta Timur secara konsisten mencatat tingkat polusi udara tertinggi. Kondisi ini ditandai dengan tingginya nilai Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU), khususnya untuk polutan PM2.5, dibandingkan dengan wilayah Jakarta lainnya. Tingginya tingkat polusi udara di Jakarta Timur tidak terlepas dari besarnya jumlah kendaraan bermotor serta kepadatan penduduk yang menjadikan wilayah ini sebagai pusat aktivitas mobilitas harian, baik internal maupun lintasan dari daerah penyangga.

Gambar 2. Perbandingan Nilai Indeks Standar Pencemar Udara PM2.5 di DKI Jakarta



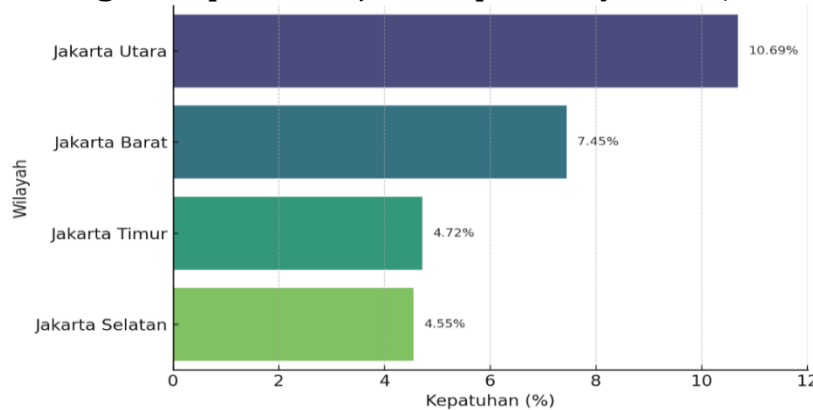
Sumber: Katadata.co.id

Sebagai bentuk respons terhadap pencemaran udara, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan kebijakan uji emisi gas buang kendaraan bermotor melalui Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 66 Tahun 2020. Kebijakan ini mewajibkan kendaraan bermotor yang berusia lebih dari tiga tahun untuk melakukan uji emisi secara berkala guna memastikan kendaraan yang beroperasi memenuhi baku mutu emisi yang telah ditetapkan. Secara normatif, kebijakan ini dirancang untuk menekan laju polusi udara dan mendorong kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perawatan kendaraan bermotor.

Namun demikian, penerapan kebijakan uji emisi di lapangan belum berjalan secara optimal. Hal ini tercermin dari rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam

melaksanakan uji emisi kendaraan bermotor. Kondisi tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2. Tingkat Kepatuhan Uji Emisi per Wilayah DKI Jakarta (2024)



Sumber: rendahemisi.jakarta.go.id

Berdasarkan Gambar 1.5 (Tingkat Kepatuhan Uji Emisi per Wilayah DKI Jakarta), yang menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan uji emisi di seluruh wilayah DKI Jakarta masih berada pada angka yang relatif rendah, dengan Jakarta Timur termasuk salah satu wilayah dengan tingkat mencapai terendah. Fakta ini mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan perilaku masyarakat sebagai sasaran kebijakan.

Rendahnya tingkat kepuasan masyarakat menjadi faktor krusial yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan uji emisi. Meskipun regulasi telah tersedia dan mekanisme penegakan hukum mulai diterapkan, tanpa dukungan dan partisipasi aktif masyarakat, kebijakan ini bertujuan untuk menurunkan tingkat polusi udara sulit untuk dicapai secara maksimal. Dengan demikian, permasalahan utama dalam kebijakan uji emisi bukan semata-mata terletak pada aspek regulatif atau teknis, melainkan pada aspek pemenuhan dan perilaku masyarakat.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis pengaruh kepatuhan masyarakat terhadap penerapan kebijakan uji emisi dalam mengatasi pencemaran udara di Kota Jakarta Timur. Kebaruan (kebaruan) penelitian ini terletak pada perpaduan indikator keberadaan masyarakat dengan teori implementasi kebijakan Merilee S. Grindle, khususnya dalam konteks kebijakan lingkungan di tingkat daerah. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor perilaku masyarakat dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan pengendalian pencemaran udara.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan eksplanatori, yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan dan pengaruh antara kepatuhan masyarakat terhadap penerapan kebijakan uji emisi kendaraan bermotor di Kota Jakarta Timur. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengukur variabel penelitian secara objektif melalui data numerik yang diperoleh dari responden.

2.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Jakarta Timur, yang dipilih karena merupakan wilayah dengan tingkat polusi udara dan jumlah kendaraan bermotor tertinggi di Provinsi DKI Jakarta. Pengumpulan data penelitian dilakukan dalam kurun waktu yang telah disesuaikan dengan kebutuhan penelitian hingga seluruh data yang terpenuhi.

2.2 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah pemilik kendaraan bermotor di Kota Jakarta Timur yang kendaraannya termasuk dalam kategori wajib uji emisi sesuai Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 66 Tahun 2020. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, dengan kriteria responden yaitu pemilik kendaraan bermotor yang berdomisili di Jakarta Timur dan memiliki kendaraan berusia lebih dari tiga tahun. Berdasarkan kriteria tersebut, jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 204 orang.

2.3 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui kuesioner yang disusun menggunakan skala Likert. Kuesioner digunakan untuk memperoleh data primer terkait variabel pemenuhan masyarakat dan implementasi kebijakan uji emisi. Selain itu, penelitian ini juga didukung oleh data sekunder yang bersumber dari dokumen resmi pemerintah, laporan instansi terkait, serta literatur yang relevan.

2.4 Teknik Analisa Data

Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan perangkat lunak Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versi 29. Analisis data dilakukan melalui dua tahap, yaitu analisis deskriptif dan analisis inferensial. Analisis deskriptif digunakan untuk mengetahui skor aktual dan skor ideal serta menentukan kategori penilaian variabel penelitian. Selanjutnya analisis inferensial dilakukan menggunakan regresi linier sederhana untuk menguji pengaruh kepatuhan masyarakat terhadap penerapan kebijakan uji emisi. Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji t dengan tingkat signifikansi 5%, serta koefisien determinasi (R^2) untuk mengetahui besarnya kontribusi variabel kepatuhan masyarakat terhadap penerapan kebijakan uji emisi kendaraan bermotor.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepatuhan masyarakat terhadap implementasi kebijakan uji emisi kendaraan bermotor dalam mengatasi polusi udara di Kota Jakarta Timur. Analisis data dilakukan dengan menggunakan regresi linier sederhana untuk menguji hubungan antara variabel kepatuhan masyarakat sebagai variabel independen (X) dan implementasi kebijakan sebagai variabel dependen (Y).

Tabel 1. Hasil Uji Regresi Linear Sederhana

Variabel Independen	Koefisien (b)	Sig.	Keterangan
(Constant)	3,157		Berpengaruh Signifikan
Kepatuhan Masyarakat	,754	0,00	

Sumber: [Output SPSS Versi 29, 2025](#)

Persamaan regresi yang diperoleh berdasarkan hasil analisis tersebut adalah sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

$$Y = 3,157 + 0,754X.$$

Persamaan tersebut menjelaskan bahwa kepatuhan masyarakat (X) memiliki pengaruh terhadap penerapan kebijakan uji emisi (Y). Nilai konstanta (a) sebesar 3,157 menunjukkan bahwa apabila pemenuhan masyarakat tidak mengalami peningkatan, maka implementasi kebijakan uji emisi tetap berada pada nilai dasar sebesar 3,157.

Sementara itu, nilai koefisien regresi (*b*) sebesar 0,754 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satuan pemenuhan masyarakat akan meningkatkan kualitas penerapan kebijakan uji emisi sebesar 0,754 satuan. Koefisien regresi bernilai positif, yang menandakan hubungan searah antara kesejahteraan masyarakat dan penerapan kebijakan uji emisi.

Berdasarkan hasil uji t parsial pada Tabel 1 diperoleh nilai t-hitung sebesar 3,157 dengan tingkat signifikansi 0,000 . Nilai tersebut lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 dan lebih besar dibandingkan nilai t-tabel sebesar 1,652 , sehingga dapat disimpulkan bahwa kepatuhan masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan kebijakan uji emisi kendaraan bermotor di Kota Jakarta Timur. Dengan demikian, hipotesis alternatif (*H_a*) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh kepatuhan masyarakat terhadap implementasi kebijakan uji emisi diterima , sedangkan hipotesis nol (*H₀*) ditolak.

Tabel 2. Hasil Uji Koefisien Determinasi (*R*²)
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,937 ^a	,878	,877	2,65960

a. Predictors: (Constant), X

b. Dependent Variable: Y

Sumber: [Output SPSS Versi 29, 2025](#)

Berdasarkan Tabel 2, nilai R Square (*R*²) sebesar 0,878 menunjukkan bahwa sebesar 87,8% variasi dalam penerapan kebijakan uji emisi dapat dijelaskan oleh variabel kepatuhan masyarakat. Sementara itu, sisanya sebesar 12,2% dipengaruhi oleh faktor lain di luar variabel penelitian ini. Nilai koefisien determinasi yang tinggi menunjukkan bahwa kepatuhan masyarakat memiliki kontribusi yang sangat kuat dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan uji emisi kendaraan bermotor di Kota Jakarta Timur.

Berdasarkan hasil analisis deskriptif, tingkat kepuasan masyarakat di Kota Jakarta Timur berada pada kategori baik dengan persentase sebesar 76% . Analisis yang disajikan masyarakat mengacu pada teori Thomas Blass yang mencakup tiga indikator utama, yaitu mempercayai (*belief*), Menerima (*accept*), dan melakukan (*act*).

a. Mempercayai (*belief*)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator keyakinan merupakan indikator paling dominan dengan persentase skor aktual sebesar 82,35%. Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat Jakarta Timur telah memiliki pengetahuan yang memadai mengenai manfaat uji emisi serta mempercayai hasil uji emisi sebagai instrumen pengendalian pencemaran udara. Tingginya tingkat keyakinan ini menjadi fondasi penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

b. Menerima (*accept*)

Indikator penerimaan memperoleh persentase sebesar 72%, yang menunjukkan bahwa pada masyarakat umumnya bersedia menerima kebijakan uji emisi, termasuk konsekuensi biaya yang ditimbulkan. Namun persentase ini lebih rendah dibandingkan indikator keyakinan, yang menandakan masih adanya pertimbangan ekonomi dan kemudahan akses dalam menerima kebijakan tersebut.

c. Melakukan (*act*)

Indikator tindakan memperoleh persentase sebesar 73% , yang mencerminkan bahwa meskipun masyarakat telah memiliki keyakinan dan penerimaan yang baik, konsistensi dalam melakukan uji emisi secara berkala masih memerlukan penguatan

lebih lanjut. Dari sisi implementasi kebijakan, variabel implementasi kebijakan uji emisi memperoleh persentase skor sebesar 73,5% , yang termasuk dalam kategori baik.

Dari sisi implementasi kebijakan, implementasi kebijakan uji emisi di Kota Jakarta Timur berada pada kategori baik dengan persentase sebesar 73,5% . Analisis berdasarkan model implementasi kebijakan Merilee S. Grindle menunjukkan bahwa dimensi isi kebijakan (isi kebijakan) dan implementasi lingkungan (konteks implementasi) telah berjalan cukup efektif.

Tabel 3. Implementasi Kebijakan Uji Emisi Berdasarkan Model Grindle

Indikator	Presentase	Kategori
Isi Kebijakan	74%	Baik
Lingkungan Implementasi	73%	Baik

Sumber: [Data primer diolah, 2025](#)

Temuan penelitian ini menunjukkan hasil yang berbeda dengan sejumlah penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa rendahnya kepatuhan masyarakat menjadi hambatan utama implementasi kebijakan uji emisi. Penelitian ini justru membuktikan bahwa pada tahun 2025, masyarakat di Kota Jakarta Timur telah menunjukkan tingkat kepatuhan yang relatif baik dan mulai memandang uji emisi sebagai kebutuhan dalam perawatan kendaraan. Hal ini menunjukkan adanya perubahan persepsi publik yang dipengaruhi oleh peningkatan sosialisasi, digitalisasi layanan, serta ketersediaan fasilitas uji emisi yang lebih mudah diakses.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kepatuhan masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap implementasi kebijakan uji emisi kendaraan bermotor dalam mengatasi pencemaran udara di Kota Jakarta Timur. Tingkat kepatuhan masyarakat berada pada kategori baik, dengan indikator mempercayai (*belief*) sebagai faktor paling dominan dalam mendorong penerimaan dan pelaksanaan kebijakan uji emisi. Implementasi kebijakan uji emisi di Jakarta Timur juga berada pada kategori baik, baik dari sisi isi kebijakan maupun implementasi lingkungannya. Namun konsistensi pelaksanaan dan partisipasi masyarakat masih perlu ditingkatkan agar kebijakan dapat berjalan lebih optimal. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan pengendalian pencemaran udara sangat bergantung pada kepatuhan dan partisipasi aktif masyarakat sebagai aktor utama kebijakan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Ade Ridwan. (2020). Implementasi kebijakan uji emisi kendaraan bermotor dalam pengendalian pencemaran udara di Kabupaten Bandung. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(2), 115–128
- Ajzen, I. (1991). Teori perilaku terencana. *Perilaku Organisasi dan Proses Pengambilan Keputusan Manusia*, 50(2), 179–211.
[https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Alfi Assyifarizi, MAM, Muryani, MA, & Rofiq, MK (2025). Evaluasi efektivitas penerapan uji emisi kendaraan dan pengaruhnya terhadap perilaku masyarakat dalam perspektif utilitarianisme. *Tinjauan Hukum Jurnal USM* , 7(1), 88–102.

- Agung, NW, Widhiastini, NW, Dewi, NLH, & Maheswari, AAIA (2025). Smart city: Tantangan mengatasi polusi udara di Kota Denpasar. *RIGGS: Jurnal Kecerdasan Buatan dan Bisnis Digital* , 3(2), 101–112.
- Blass, T. (1991). Memahami perilaku dalam eksperimen kepatuhan Milgram: Peran kepribadian, situasi, dan interaksinya. *Jurnal Kepribadian dan Psikologi Sosial* , 60(3), 398–413.
<https://doi.org/10.1037/0022-3514.60.3.398>
- Grindle, MS (1980). Implementasi kebijakan di Dunia Ketiga. *Politik Dunia*, 33(1), 1–28.
<https://doi.org/10.2307/2010171>
- Hill, M., & Hupe, P. (2009). Menerapkan kebijakan publik: Tata kelola dalam teori dan praktik. *Studi Kebijakan*, 30(1), 1–19.
<https://doi.org/10.1080/01442870902863818>
- Milgram, S. (1974). Studi perilaku kepatuhan. *Jurnal Psikologi Abnormal dan Sosial*, 67(4), 371–378.
<https://doi.org/10.1037/h0040525>
- Naura, Prasetyo, B., Sulistiawati, D., Dwiningish, SR, & Jaelani, LM (2025). Analisa hubungan kualitas udara (PM2.5, PM10, PM1, dan NO₂) terhadap angka kejadian bayi berat badan lahir rendah (BBLR). *Jurnal Ners* , 9(1), 23–34.
- Noorhakim, O. (2021). Efektivitas penerapan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 66 Tahun 2020 tentang uji emisi kendaraan bermotor. *Jurnal Hukum Lingkungan*, 5(1), 45–60.
- Ostrom, E. (2000). Tindakan kolektif dan evolusi norma sosial. *Jurnal Perspektif Ekonomi*, 14(3), 137–158.
<https://doi.org/10.1257/jep.14.3.137>
- Sabatier, PA, & Mazmanian, DA (1980). Implementasi kebijakan publik: Kerangka analisis. *Jurnal Studi Kebijakan*, 8(4), 538–560.
<https://doi.org/10.1111/j.1541-0072.1980.tb01266.x>
- Safitri. (2025). Implementasi peraturan gubernur dalam pengendalian polusi udara melalui kebijakan uji emisi kendaraan bermotor. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik*, 4(1), 55–68.
- Setyanugraha, MA (2020). *Pengaruh integritas karyawan, kualitas pelayanan, dan kearifan lokal terhadap loyalitas anggota BMT*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri.
- Steg, L., & Vlek, C. (2009). Mendorong perilaku pro-lingkungan: Tinjauan integratif. *Jurnal Psikologi Lingkungan*, 29(3), 309–317.
<https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2008.10.004>
- Tyler, TR (2006). Perspektif psikologis tentang legitimasi dan legitimasi. *Annual Review of Psychology*, 57, 375–400.
<https://doi.org/10.1146/annurev.psych.57.102904.190038>
- Utami, YHP (2021). *Pengaruh kebijakan publik terhadap perilaku masyarakat*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri.
- Organisasi Kesehatan Dunia. (2021). Pedoman kualitas udara global WHO: Partikel debu (PM2.5 dan PM10). *Environment International*, 154, 106878.
<https://doi.org/10.1016/j.envint.2021.106878>
- Zakiudin Fikri. (2020). Implementasi kebijakan pendataan penduduk tidak tetap di Kabupaten Bangka. *JIAP: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 4(2), 89–101.
- Zhang, Y., Jin, Y., & Tang, Y. (2020). Kepatuhan publik dan efektivitas kebijakan dalam pengendalian emisi kendaraan. *Journal of Cleaner Production*, 276, 123196.
<https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.123196>

Zhou, Z., Liu, Q., & Yang, J. (2019). Emisi kendaraan, polusi udara, dan respons kebijakan publik. *Transportation Research Part D: Transport and Environment*, 67, 511–523.
<https://doi.org/10.1016/j.trd.2018.11.020>